

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan di Indonesia tahun 1998 yang merupakan tonggak awal reformasi. Dalam era reformasi tersebut telah terjadi perubahan pada pemerintahan tingkat pusat dengan tingkat pemerintahan daerah. Hal ini ditujukan dengan adanya sistem pemerintahan yang semula memakai sistem sentralisasi kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Adanya penerapan sistem desentralisasi pada sektor pemerintahan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Regulasi itu adalah landasan untuk pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Yang disebut otonomi daerah yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian dijadikan suatu kebutuhan tentang pentingnya pengendalian untuk melakukan otonomi daerah (Saputro dan Mahmud, 2015).

Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah diharuskan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan secara rasional, transparan dan bertanggung jawab. Pemberlakuan otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Namun pada kenyataannya kesenjangan antar daerah di Indonesia masih saja terjadi. Hal ini dikarenakan keadaan geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Maka dari itu perlu memperhatikan dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah sesuai dengan

keahlian dari daerah masing-masing dalam menyusun rencana anggaran belanja daerah. *Planning*, *Controlling*, dan *public acuntability* aspek tersebut masuk dalam perkiraan anggaran sektor publik yang berhubungan dengan belanja daerah (Hartono dkk, 2014).

Agar penerapan otonomi daerah berjalan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan. Lemahnya pengendalian intern bisa mengakibatkan Kecurangan dalam suatu organisasi sektor publik ataupun sektor swasta. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi tersebut maka pemerintah daerah merancang suatu sistem pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan pemerintah daerah, keandalan, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjadikan petunjuk oleh pemerintah kabupaten atau kota, agar mampu menemukan adanya suatu kelemahan yang bisa menyebabkan masalah dalam melakukan kegiatan pengendalian yang terdiri dari: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern (Nurwati dan Trisnawati, 2015).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai auditor eksternal pemerintah daerah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu kriteria pemberian opini adalah pemeriksaan atas efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Semakin banyak jumlah temuan menunjukkan semakin lemah sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan sistem pengendalian intern terdiri atas kelemahan akuntansi pelaporan, kelemahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kelemahan struktur pengendalian (Yamin dan Sutaryo, 2015).

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi lembaga-lembaga daerah dan satuan polisi pamong praja sesuai kebutuhan (Puspitasari, 2013). Banyaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah sehingga pemerintahannya menjadi kompleks. Organisasi yang semakin kompleks dalam menjalankan kegiatan yang mempunyai area menyebar maka pengendalian intern sulit dijalankan. Penelitian Yamin dan Sutaryo (2015), Puspitasari (2013) menemukan bahwa Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh positif dengan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) Jumlah penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau juga mereka yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi memiliki

tujuan untuk menetap. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan tekanan serta pengawasan pengendalian intern pada pemerintah daerah akan semakin besar. Penelitian Yamin dan Sutaryo (2015). Penelitian Nurwati dan Trisnawati (2015), Yamin dan Sutaryo (2015) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya adalah temuan atas sistem pengendalian intern yang menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern terdiri dari : kelemahan sistem pengendalian intern akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern (Yamin dan Sutaryo, 2015). Temuan tahun sebelumnya memiliki hubungan dengan temuan tahun selanjutnya selama masalah yang menimbulkan perubahan tersebut belum terpecahkan. Penelitian fatimah dkk (2014), Yamin dan Sutaryo (2015) menemukan bukti bahwa temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah penilaian diselenggarakannya urusan pemerintahan daerah dengan menggunakan pengukuran antara lain: masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. (Mudhofar dan Thohar, 2016). Semakin efektif kinerja evaluasinya , maka semakin meningkat pula pengendalian internnya. Penelitian Sutaryo. Dkk (2013) menemukan bukti bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah.

Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah usaha penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dicantumkan pada hasil laporan pemeriksaan, baik berupa pemeriksaan internal ataupun eksternal. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang semakin besar, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan kelaianan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian dari Yamin dan Sutaryo (2015) menemukan bahwa TLRHP berpengaruh negatif terhadap SPI pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapatkan daerah dengan mengelola atau dengan memanfaatkan potensi daerahnya. Penerimaan yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Fauza, 2015). Semakin banyaknya PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin banyak keahlian suatu daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik dan sebagai peningkatan dalam pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat juga semakin baik. Penelitian Larassati *et al*, (2013) menemukan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan SPI pemerintah daerah.

Penelitian mengenai ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Bayu Kristanto,

dkk (2009). Menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh Ridha dan Yamin, (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor penentu terhadap sistem pengendalian intern justru berpengaruh tidak signifikan, hubungannya justru berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi faktor penentu dengan kelemahan pengendalian intern. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menambahkan faktor-faktor penentu dalam pengendalian intern untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Penelitian ini mengacu pada Penelitian Yamin dan Sutaryo (2015) akan tetapi terdapat perbedaan periode dan sampel penelitian. Tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 2012-2014 dan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sedangkan penelitian sebelumnya adalah tahun 2012 dan sampel yang digunakan pemerintah kabupaten/kota diseluruh indonesia yang menyusun LKPD. Dengan demikian pada penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH DAERAH.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagi entitas pemerintah SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk memantau dan memberi

keyakinan bahwa tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Tujuan yang tidak dapat dicapai dengan maksimal, maka akan menimbulkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian mengenai pelaksanaan SPIP telah memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan masalah penelitian tersebut perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah SKPD terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?
6. Bagaimana pengaruh PAD terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh jumlah SKPD terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
2. Pengaruh jumlah penduduk terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Pengaruh temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
4. Pengaruh evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
5. Pengaruh tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
6. Pengaruh PAD terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan akademisi dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama dibidang akuntansi sektor

publik yang terkait dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Menyampaikan informasi terkait dengan begitu pentingnya dalam penerapan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah, sehingga kemampuan yang sudah dimiliki daerah dapat dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga dapat untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah.

b. Bagi Peneliti

Memberikan informasi mengenai topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkannya.